

## **JAMKESDA**

### **PERBUP KABUPATEN MALUKU TENGGARA NO. 72 TAHUN 2009**

**2009**

#### **PERATURAN BUPATI KABUPATEN MALUKU TENGGARA TENTANG JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA) KABUPATEN MALUKU TENGGARA**

**ABSTRAK** : - Bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang memadai bagi masyarakat sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008-2013, untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan hak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan diri sebagai manusia yang bermartabat untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak guna meningkatkan taraf hidup menuju masyarakat yang sejahtera, adil dan merata maka peningkatan jaminan kesehatan merupakan salah satu faktor penting dan penentu dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat. Untuk melaksanakan kewajiban Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan dan kemudahan demi menjamin terselenggaranya peningkatan derajat kesehatan masyarakat bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi maka perlu memberikan Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) bagi masyarakat miskin dan atau masyarakat yang tidak mampu yang belum terproteksi dalam Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) dan Askes Sosial sesuai Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Maluku dengan PT. Askes (Persero) tentang Penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah bagi Masyarakat di Provinsi Maluku. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Maluku Tenggara.

- Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 14 Tahun 2009.
- Peraturan ini mengatur tentang:

Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kabupaten Maluku Tenggara, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;
2. Tujuan Dan Sasaran;
3. Pemberian Jaminan Kesehatan Daerah;
4. Pengelola Jamkesda;
5. Mekanisme Pelaksanaan;
6. Pertanggungjawaban;
7. Pengawasan;
8. Ketentuan Penutup.

**STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;  
- Ditetapkan pada tanggal 30 Oktober 2009.

## **BARANG MILIK DAERAH**

### **PERBUP KABUPATEN MALUKU TENGGARA NO. 76 TAHUN 2009**

**2009**

### **PERATURAN BUPATI KABUPATEN MALUKU TENGGARA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**

**ABSTRAK** : - Bahwa barang milik daerah merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, oleh karena itu perlu dikelola secara efektif, efisien dan bertanggungjawab sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal dalam rangka mendukung penyelenggaraan otonomi daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Maluku Tenggara.

- Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Tingkat II Maluku Tenggara Nomor 2 Tahun 1977; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 02 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2008.

- Peraturan ini mengatur tentang:

Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;
2. Pejabat Pengelolaan Barang Milik Daerah;
3. Perencanaan Dan Pengadaan;
4. Penyimpanan Dan Penyaluran;
5. Penggunaan;
6. Pemanfaatan;
7. Pengamanan Dan Pemeliharaan;

8. Penilaian;
9. Penghapusan;
10. Pemindahtanganan;
11. Penatausahaan;
12. Pembinaan, Pengendalian Dan Pengawasan;
13. Ketentuan Lain-Lain;
14. Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Barang;
15. Sengketa Barang Milik Daerah;
16. Sanksi Administrasi;
17. Ketentuan Penutup.

**STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;  
- Ditetapkan pada tanggal 11 Desember 2009.

## **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

### **PERBUP KABUPATEN MALUKU TENGGARA NO. 2.a TAHUN 2010**

**2010**

#### **PERATURAN BUPATI KABUPATEN MALUKU TENGGARA TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA**

**ABSTRAK** : - Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 97 Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan pasal 239 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan. Berdasarkan ketentuan pasal 90 Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati berdasarkan standar akuntansi pemerintahan menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati Maluku Tenggara tentang Kebijakan Akuntansi.

- Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2008.

- Peraturan ini mengatur tentang:

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;
2. Kebijakan Akuntansi;
3. Ketentuan Peralihan;
4. Ketentuan Penutup.

**STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;  
- Ditetapkan pada tanggal 26 Januari 2010.

## **BARANG MILIK DAERAH – IZIN PEMAKAIAN**

### **PERBUP KABUPATEN MALUKU TENGGARA NO. 3 TAHUN 2011**

**2011**

### **PERATURAN BUPATI KABUPATEN MALUKU TENGGARA TENTANG IZIN PEMAKAIAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA**

- ABSTRAK** : - Bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 14 ayat (1) huruf d serta ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, maka penggunaan aset pemerintah daerah dapat dikelola sebagai upaya intensifikasi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, maka untuk pemberian izin pemakaian Barang Milik Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, perlu diatur dengan Peraturan Bupati. Untuk itu, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Maluku Tenggara.
- Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 02 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2008.
  - Peraturan ini mengatur tentang:  
Izin Pemakaian Barang Milik Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, dengan sistematika sebagai berikut:
    1. Ketentuan Umum;
    2. Nama, Obyek Dan Subyek;
    3. Ketentuan Perizinan;
    4. Struktur Dan Besarnya Tarif Perizinan;
    5. Prosedur Penggunaan Barang Milik Daerah;
    6. Tata Cara Pembayaran;
    7. Ketentuan Lain-Lain;

8. Ketentuan Penutup.

- STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;  
- Ditetapkan pada tanggal 10 Januari 2011.

**BPHTB – SISTEM DAN PROSEDUR**

**PERBUP KABUPATEN MALUKU TENGGARA NO. 8 TAHUN 2011**

**2011**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN MALUKU TENGGARA TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA**

- ABSTRAK** : - Bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 19 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan perlu disusun Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Peraturan Bupati Maluku Tenggara.
- Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 2.b Tahun 2010.
- Peraturan ini mengatur tentang:  
Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Maluku Tenggara, dengan sistematika sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum;
  2. Ruang Lingkup;
  3. Sistem Dan Prosedur Pemungutan BPHTB;
  4. Fasilitasi;
  5. Ketentuan Penutup.
- STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;  
- Ditetapkan pada tanggal 1 Februari 2011.